

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.R. Soehoed. 2004. *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit : Perekayasaan dan Pelaksanaan Reklamasi Bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit*. Jakarta: Djambatan.
- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2019. *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dhiana Puspitawati, 2017. *Hukum Laut Internasional*, Jakarta: Kencana.
- Dikdik Mohammad Sodik. 2011. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Refka Aditama.
- Dietrich Bean, 2002. *Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya* (catatan ketiga), Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Laut Institute Pertanian Bogor
- Edi Suharto, 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta,
- _____, 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta.
- Irwansyah, 2021. *Penelitian Hukum: Piihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Mega Cakrawala.
- Irwansyah, Birkah Latif, Laode M. Syarif. Andri G. Wibisana, et al, 2015, *Hukum lingkungan Teori, Legalisasi dan Studi Kasus, The Asia Foundation*
- Krisna Fery Rahmantya, et.al, 2018, *Buku Pintar Kementrian Kelautan dan Perikanan, Pusat Data, Statistik dan Informasi Kemtrian Kelautan dan Perikanan*. Jakarta.
- Leo Agustino, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta,
- Milawartati Ruslan, 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Dendengan Kabupaten Banggai*, CV Azka Pustaka.
- Muhammad Ilham Ari Saputra. 2015. *Reforma Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmaja, 1975. *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia; Beberapa Pikiran Dan Saran*, Bandung: Binacipta
- Munandjat Danusaputro, 1985. *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Bandung: Bina Cipta
- N. H. T. Siahaan, 2006, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 137.
- _____, 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Philippe Sand, 2003. *Principles Of International Enveronmental Law*, Cambrige University Press
- Rina Yulianti, 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*, Surabaya: Scoprinto Media Pustaka.
- Rianto Adi, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Rosmawaty Sidauruk, 2018. *Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) Dalam Perencanaan pembagunan Daerah (Suatu Kajian Taktis di Provinsi Jawa Tengah dan Banten)*, Jakarta: Indocamp
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 40
- Setiono, 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2012. *Metode Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R D*, Alfabeta, Bandung.
- Suparti Wijoyo, 2017. *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, Surabaya: University Press.
- Sohn, L.B. & Weiss, E.B., 1987. *The Annual Meeting (American Society of International Law) & Intergenerational Equity in International Law*.
- Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia edisi kedua*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. 1984. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung.
- Yunus Wahid, 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Prendamedia Group

JURNAL

- A. Soegiarto, 2008. *Dampak Eksploitasi Pasir Laut terhadap Ekosistem Pesisir di Indonesia*, Majalah Oseana, Vol. 33 No. 3.
- A. Soemarmi, E. Indarti, Pujiyono, & A. Diamantina. 2019. *Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 48. No. 3.
- Andri G. Wibisana, 2017. *Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi: Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No. 1.
- Basse Siang Parwansa, 2008. *Marine Politan Sebagai Basis Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan*, Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan, No. 1 Vol. 18.
- Dewa Gede Sudika Mangku, 2020. *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional*, Tanjungpura Law Journal, Vol. 4 Issue 2.

- Dian Anggraini, 2021. *Larangan Ekspor Pasir Laut dalam Perspektif Hukum Lingkungan: Refleksi Kebijakan 2002*, Jurnal Hukum Kelautan dan Pesisir, Vol. 6 No. 1
- Helena Dwi Yansen, et.al, 2023, *Analisis Kebijakan Ekspor Sedimentasi Laut (Pasir Laut) Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut*, Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan, Vol. 1 No. 1.
- Hendrik B. Sompotan, et.al, 2021, *Upaya Hukum Terhadap Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982*, Lex Et Societatis, Vol. IX No. 2.
- Hendra Singarimbun, 2022. *Pengelolaan Ruang Laut dan Permasalahannya dalam Kebijakan Zonasi: Kajian Regulasi dan Implementasi*, Jurnal Ilmu Kelautan Tropis, Vol. 25 No. 2
- Ikan Handayani Paturu & Aulia Vivi Yulianingrum, 2023. *Penerapan Sanksi Pidana dan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Oleh Korporasi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 2.
- Siti Romdona, et. al., 2025. *Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner*, Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, Vol.3 No. 1.
- Syaiful Bahri, 2022. *Eksplorasi Pasir Laut dan Ancaman Ekologisnya: Perspektif Hukum Lingkungan*, Jurnal Hukum & Pembagunan, Vol. 52 No. 3
- Zulkifli Aspan. 2017. *Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Prespektif Undang-Undang Lingkungan Hidup)*. Jurnal Amana Gappa.

SUMBER INTERNET

- Anonim, “*Jaring Nusa : Penambangan dan Ekspor Pasir Laut adalah Kebijakan Ekstrim*”, Press Release, Edisi Tanggal 26 September 2024. <https://walhisulsel.or.id/4412-jaring-nusa-penambangan-dan-ekspor-pasir-laut-adalah-kebijakan-ekstrim/> diakses pada November 11, 2024
- Ban on Cambodian Sand Exports to Singapore (nepia.com) diakses pada 1 Desember 2024
- Exclusive: In blow to Singapore's expansion, Malaysia bans sea sand exports | Reuters diakses pada 1 Desember 2024
- Ichwas Susanto, “*Ekspor Pasir Laut di Indonesia Dibuka Lagi, Bagaimana Dampaknya?*”, Kompas.id, Edisi Tanggal 23 September 2024, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/09/23/ekspor-pasir-laut-di-indonesia-dibuka-lagi-bagaimana-dampaknya> diakses pada November 11, 2024.
- M. Ambari, *Kontroversi Ekspor Pasir Laut : Ancaman Lingkungan atau Peluang Ekonomi?*, Edisi Tanggal 24 September 2024, <https://www.mongabay.co.id/2024/09/24/kontroversi-ekspor-pasir->

[laut-ancaman-lingkungan-atau-peluang-ekonomi/](#),

diakses

November 20, 2024.

Navalia Caren, *Ekspor Pasir Laut atau Keberuntungan?*, Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/ekspor-pasir-laut-ancaman-atau-keberuntungan/>, diakses pada November 20, 2024

Thailand bans exporting of natural sand - Pattaya Mail diakses pada 24 Oktober 2023

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat 1

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. UU Nomor 13 Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Wawancara

Wawancara dengan ibu Dr. Hj. Siti Masniah Djabir, S.Pi., M.P. selaku Ketua Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada tanggal 28 Agustus 2025.

Wawancara dengan Bapak Oky, selaku Petugas Agen Layanan Statistik (Gelatik), pada tanggal 21 Agustus 2025.

Wawancara dengan Bapak Efendi, selaku Kepala Divisi Hukum Walhi, pada tanggal 16 Juni 2025.

Wawancara dengan Bapak Jumal, Bapak Rampu dan Bapak Laja pada tanggal 23 Juni 2025.

Wawancara dengan Ibu Ngitung, pada tanggal 25 Juni 2025.